



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RIKAWATI
NIK : ██████████
Lembaga : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Unit Kerja : DINAS KESEHATAN
Sub Unit Kerja : UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 25 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIKAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 960526

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	138.720.000
1. Tanah Seluas 197 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI		
30.720.000		
2. Tanah Seluas 450 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI		
Rp. 108.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT CKD Tahun 2018,		
HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	176.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	300.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	812.871.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.607.591.000
III. HUTANG	Rp.	64.450.691
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.543.140.309

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.